

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKP Daerah ini merupakan dokumen perencanaan Tahunan daerah Pemerintah Kota Batu Tahun 2018 sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP Pusat, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang akan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan

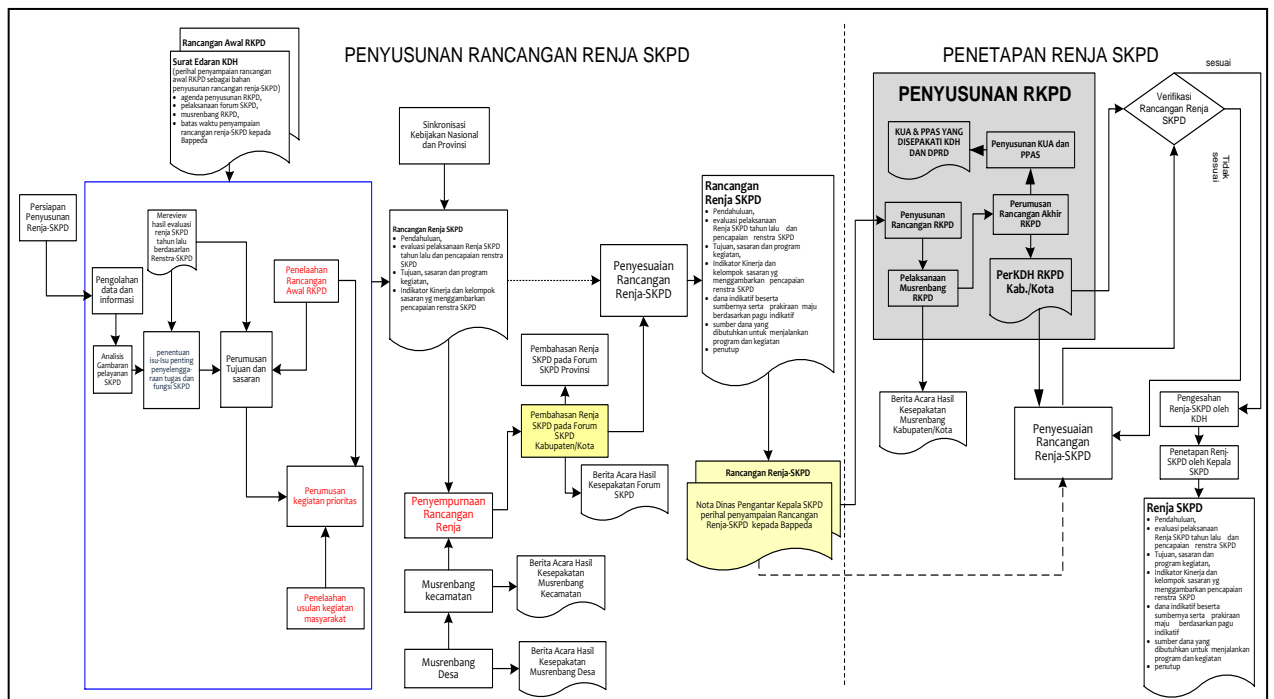
dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD



1.2 Landasan HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Renja BKD Kota Batu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu;

13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor tahun, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu tahun 2018 - 2022.
14. Peraturan Walikota Batu Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5/E);
16. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan Daerah tahun 2019.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018. Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai alat ukur untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan evaluasi pada akhir tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program dan kegiatan pembangunan disusun berdasarkan pada upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Batu sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu Tahun 2012 - 2017. Program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah yang direncanakan dalam kurun waktu 5 tahunan dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan untuk membiayai kegiatan operasional kantor BKD. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan untuk menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana bagi pegawai beserta pemeliharannya. Selain itu program ini merumuskan sasaran pemenuhan sarana dan prasarana gedung perkantoran terpadu meliputi interior, mebel, sebagai program kegiatan lanjutan bagi pemenuhan sarana prasarana gedung perkantoran terpadu. Pemenuhan sarana prasarana

tersebut direncanakan akan tuntas tahun 2017 dan untuk tahun 2018 diproyeksikan untuk rehabilitasi berkala gedung perkantoran terpadu. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, ditujukan untuk pemenuhan operasional dan pemeliharaan gedung perkantoran terpadu. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, pada tahun 2017 dilaksanakan untuk seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batu dipusatkan di Badan Keuangan Daerah. Kegiatan Pelayanan Operasional Gedung Perkantoran Terpadu untuk memenuhi operasional pelayanan gedung perkantoran terpadu termasuk penyediaan fasilitas dan prasarana kerjanya.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya di Badan Keuangan Daerah. Pengembangan SDM tersebut dikhususkan pada disiplin ilmu tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, namun tidak menutup kemungkinan peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan untuk menunjang kegiatan administratif, misalnya dalam bidang perencanaan, kesekretariatan, hukum dan perundang-undangan bagi intern pegawai Badan Keuangan Daerah. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Pada tahun 2017 kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dilaksanakan dalam bentuk pengiriman Diklat PIM IV bagi pejabat struktural Eselon IV sebanyak 5 orang. Untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, pada tahun 2017 dilaksanakan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah bagi seluruh pejabat dan staf Badan Keuangan Daerah yang diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Badan Keuangan Daerah.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini disusun dengan rencana output berupa laporan baik laporan capaian kinerja maupun keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD, Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Penyusunan

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD, Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan,

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah, Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelesaian Aset/Barang Daerah, Penyusunan Pedoman Pengelolaan Aset/Barang Daerah, Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah, Manajemen Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Penertiban dan Pengamanan Aset/BMD, Perencanaan dan Analisa Kebutuhan BMD, Penunjang Administrasi dan Penatausahaan Keuangan
6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota yaitu Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Komputer Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan sistem e-budgeting yang digunakan untuk penyusunan anggaran tahun 2018.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

2.7 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja.

Dimana aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lian-lain Pendapatan Yang Sah. Sedangkan Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam perencanaan APBD terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah.

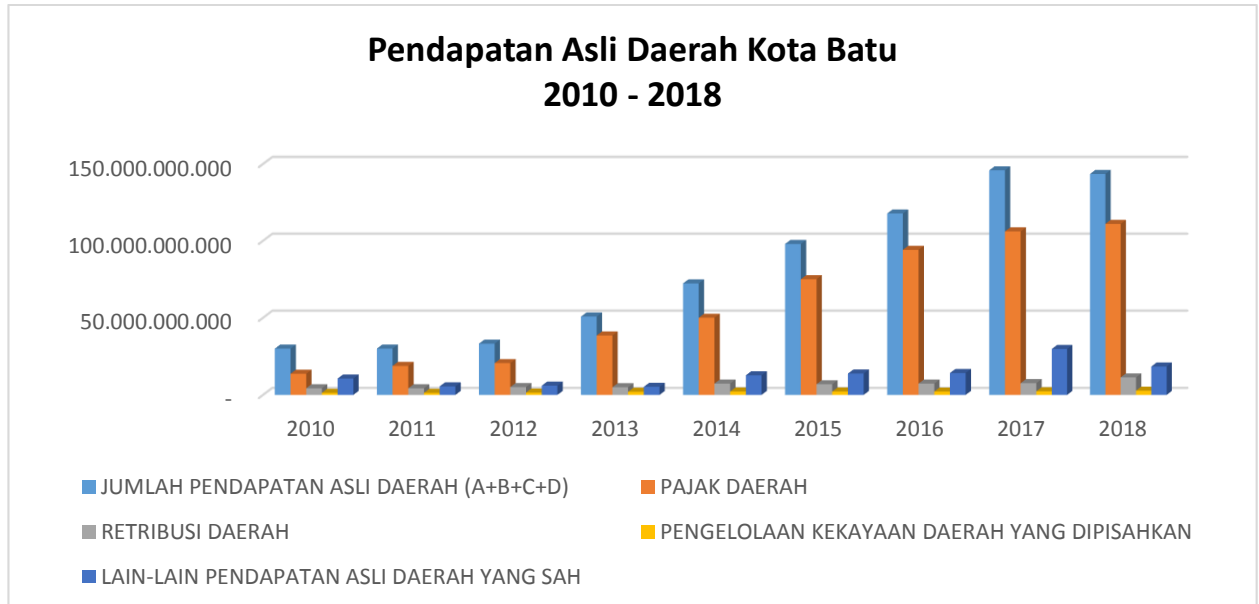
Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa dari sisi pendapatan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan/kenaikan yang sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sekitar 10,90%.

Kinerja Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009 s/d 2016

URAIAN	TAHUN						
	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016
PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.386.741.568,44	17.735.602.953,95	30.241.864.301,14	38.794.059.670,00	80.493.920.959,00	104.233.584.925,34	109.335.330.020,16
Pendapatan Pajak Daerah	7.861.348.123,00	9.529.225.958,00	19.404.220.619,00	28.187.860.661,00	62.807.445.882,00	83.692.699.934,00	88.573.005.670,00
Pajak Hotel	2.071.255.439,00	2.674.675.976,00	3.365.076.772,00	5.244.491.392,00	14.390.391.081,00	16.533.613.716,00	17.944.383.056,00
Pajak Restoran	392.560.215,00	535.866.990,00	1.268.660.956,00	1.697.168.121,00	3.994.449.379,00	5.874.199.585,00	7.439.408.612,00
Pajak Hiburan	1.978.360.490,00	2.766.190.750,00	3.751.062.526,00	3.402.281.809,00	6.019.223.859,00	7.669.602.854,00	10.023.704.360,00
Pajak Reklame	419.396.604,00	465.643.756,00	594.919.662,00	606.574.334,00	504.821.136,00	470.671.373,00	1.592.985.203,00
Pajak Penerangan Jalan	2.802.325.375,00	2.873.808.486,00	3.682.506.792,00	5.521.137.467,00	8.577.158.978,00	9.702.985.905,00	10.417.809.198,00
Pajak Parkir	197.450.000,00	213.040.000,00	379.455.850,00	514.102.457,00	835.458.838,00	917.778.602,00	1.140.417.722,00
Pajak Air Bawah Tanah			500.652.185,00	689.989.879,00	697.703.981,00	716.003.984,00	1.425.148.171,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					10.245.426.431,00	11.284.043.302,00	18.016.708.373,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			5.861.885.876,00	10.512.115.202,00	17.542.812.199,00	30.523.800.613,00	20.572.440.975,00
Hasil Retribusi Daerah	3.087.977.630,00	3.478.065.774,00	4.048.972.418,00	4.925.276.704,00	4.480.985.852,10	5.209.867.148,00	5.846.996.775,00
Retribusi Jasa Umum	1.559.067.000,00	1.802.926.688,00	1.933.887.418,00	2.486.582.174,00	2.466.319.950,10	2.388.840.775,00	2.722.147.275,00
Retribusi Jasa Usaha	392.699.200,00	472.676.786,00	474.404.500,00	619.654.830,00	358.342.602,00	717.787.573,00	679.840.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.136.211.430,00	1.202.462.300,00	1.640.680.500,00	1.819.039.700,00	1.656.323.300,00	2.245.009.500,00	2.445.009.500,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	876.068.906,11	924.903.592,24	1.543.221.141,00	1.690.951.280,48	2.189.729.441,01	2.177.429.333,26	2.152.462.133,00
Bagian Laba Atas penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah BUMN	876.068.906,11	924.903.592,24	1.543.221.141,00	1.690.951.280,48	2.189.729.441,01	2.177.429.333,26	2.152.462.133,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.561.346.909,33	3.803.407.629,71	5.245.450.122,55	3.989.971.024,90	11.015.759.784,52	13.153.588.510,08	12.762.865.442,16
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan				114.750.000,00			
Penerimaan Jasa Giro	2.560.766.108,15	2.473.633.390,31	2.303.600.681,40	2.907.681.390,55	6.258.529.493,34	7.396.584.958,00	4.702.116.469,20
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)			63.900.000,00	8.150.000,00	1.325.000,00	27.521.000,00	9.792.000,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	260.672.772,43	214.034.861,28	489.949.786,03	240.107.564,35	98.448.588,00	225.791.502,26	1.161.620.037,03
Pendapatan Denda Pajak			14.341.778,00	14.982.090,00	374.137.056,00	513.357.758,00	529.436.804,72
Pendapatan Dari Pengembalian	2.086.840.577,92	584.449.072,85	672.633.315,72	281.769.012,00	2.382.013,04		
Pendapatan Lain-lain	653.067.450,83	531.290.305,27	1.701.024.561,40	422.530.968,00	1.948.005.634,14		
Dana Kapitasi JKN pada FKTP					2.332.932.000,00		
Pendapatan Denda Retribusi							2.837.800,00

Sumber: Badan Keuangan, Daerah Kota Batu

Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Batu
Tahun 2109-2018



Pendapatan Asli Daerah Kota Batu berasal dari beberapa sumber pendapatan meliputi:

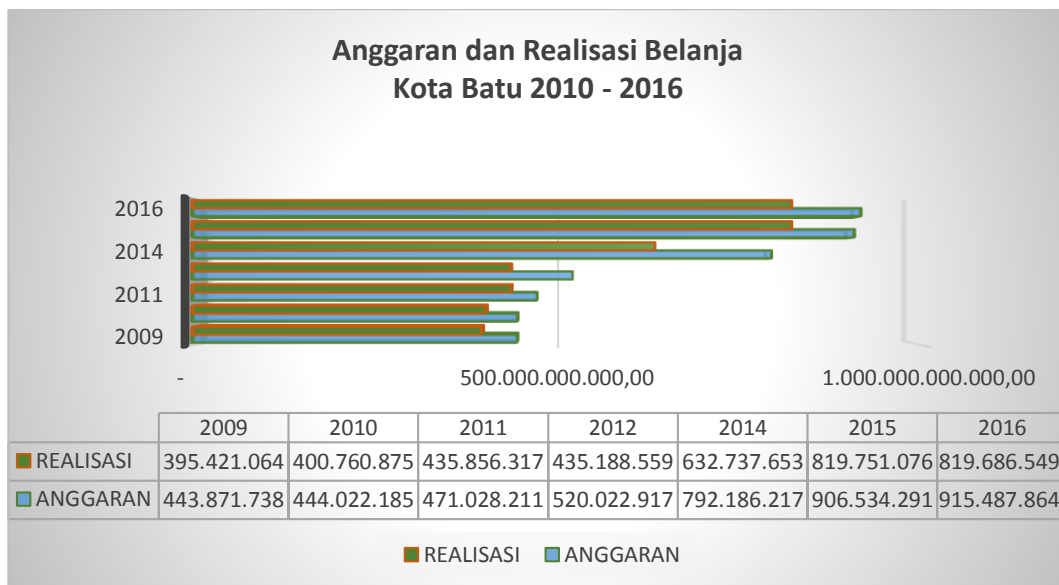
- a. Pendapatan Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Dari beberapa sumber pendapatan asli daerah Kota Batu, PAD didominasi dari pendapatan pajak daerah. Adapun sumber pendapatan pajak daerah Kota Batu adalah:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Air Bawah Tanah
- h. Pajak Bumi dan Bangunan
- i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan pendapatan selanjutnya dialokasikan sebagai belanja untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam penyediaan pelayanan umum. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Tentunya setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dianggarkan.

Gambar
Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Batu
Tahun 2010 - 2016



Grafik diatas menunjukkan gambaran Belanja Daerah Kota Batu tahun 2009-2016 dimana rata-rata pertumbuhan belanja daerah per tahun sekitar 10,3 persen. Adapun komposisi belanja langsung dan tidak langsung APBD 2009 – 2017 adalah seperti digambarkan pada tabel berikut:

Tabel
Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kota Batu
Tahun 2009 – 2017

TAHUN	Belanja tidak langsung	Belanja Langsung	TOTAL BELANJA	% Belanja Langsung terhadap Belanja APBD
2009	185.320.681.396,60	258.551.057.370,00	443.871.738.766,60	58,25
2010	236.244.764.906,00	207.777.420.377,00	444.022.185.283,00	46,79
2011	242.513.111.774,81	228.515.099.720,00	471.028.211.494,81	48,51
2012	290.683.441.517,00	229.339.476.247,00	520.022.917.764,00	44,10
2013	324.721.310.330,42	345.836.472.440,89	670.557.782.771,31	51,57
2014	370.400.615.054,37	421.785.602.459,00	792.186.217.513,37	53,24
2015	394.195.774.553,85	512.338.513.358,30	906.534.287.912,15	56,52
2016	446.996.538.597,28	468.491.325.753,88	915.487.864.351,16	51,17
2017	432.488.127.325,49	495.719.103.742,00	928.207.231.067,49	53,41

Pengeluaran atau belanja pemerintah daerah kabupaten kota untuk keperluan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dibiayai melalui APBD. Belanja menurut kelompok belanja dalam Permendagri 59 Tahun 2007 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung dapat diukur dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Jenis belanja tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan seperti belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Dari tabel tersebut tampak bahwa Pemerintah Kota Batu dari tahun ke tahun berusaha untuk terus meningkatkan rasio belanja langsung terhadap total belanja APBS, karena melalui belanja langsung ini kinerja program kegiatan suatu daerah dapat diukur.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Kota Batu

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator kinerja tujuan
2	Prosentase peningkatan PAD			3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,70%		3,50%	3,50%	Indikator kinerja tujuan

2.8 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu, bahwa Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Keuangan Daerah telah menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan indikator kinerja:

1. Opini BPK
2. Prosentase peningkatan PAD

Untuk pencapaian kinerja Opini BPK, Pemerintah Kota Batu telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut mulai tahun 2015 sampai dengan 2017.

Artinya bahwa target kinerja dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah mempertahankan opini BPK dengan catatan seminimal mungkin dan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, Badan Keuangan Daerah dituntut untuk bisa bersinergi dengan seluruh SKPD untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu sebagai upaya untuk meraih Opini BPK, Badan Keuangan Daerah dituntut lebih intens bersinergi dengan Inspektorat untuk penyelesaian tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK.

Untuk pencapaian kinerja prosentase peningkatan PAD, menjadi tantangan tersendiri bagi badan Keuangan Daerah Kota Batu. Kendala yang ada selama ini adalah pemetaan potensi pajak yang masih kurang maksimal sehingga penetapan target PAD terutama dari sektor pajak dan retribusi masih didasarkan pada tren pertumbuhan realisasi pajak dan retribusi. Selain itu, Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan Daerah sudah mulai harus menyusun kajian peningkatan potensi pendapatan daerah dari sektor selain pajak dan retribusi ketika target yang ditetapkan sudah mendekati nilai potensi yang ada.

2.9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD Tahun 2019, Badan Keuangan Daerah menetapkan 9 program dan 45 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 25.922.596.780,-. Berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kinerja kinerja Tahun 2018 Triwulan II serta perubahan Draft Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2018 – 2019, maka terdapat beberapa perubahan pada rancangan awal RKPD sebagai berikut:

1. Perubahan pagu kegiatan pada UPT Perkantoran terpadu dengan asumsi pengurangan belanja modal karena sudah terpenuhi pada tahun 2018
2. Perubahan indikator program dan kegiatan pada Bidang Perbendaharaan Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah.

Dari rencana awal pagu anggaran Rencana Kerja Tahun 2019 sebesar Rp. 25.922.596.780,-, terdapat penambahan sebesar Rp. 200.000.000,- , sehingga pagu akhir usulan Rencana Kerja Tahun 2019 sebesar Rp. 26.122.596.780,-.

Adapun rincian perubahan pagu dan indikator program kegiatan sebagaimana tersebut di atas selengkapnya pada Tabel T-C.31.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Batu

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.04 . 4.04.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD	Indeks Survey Kepuasan terhadap layanan administrasi keuangan	78	7.517.807.160	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD	Indeks Survey Kepuasan terhadap layanan administrasi keuangan	78	5.809.457.260	
4.04 . 4.04.01.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKD	Jumlah layanan surat masuk dan keluar yang ditindaklanjuti	11000	16.658.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKD	Jumlah layanan surat masuk dan keluar yang ditindaklanjuti	11000	16.658.400	
4.04 . 4.04.01.01 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD	Pembayaran listrik, air, telepon, tv kabel	12 bulan	3.247.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD	Pembayaran listrik, air, telepon, tv kabel	12 bulan	2.685.000.000	Asumsi pembayaran listrik, air, telepon berdasarkan realisasi rata-rata pembayaran listrik air, telepon tahun 2018
4.04 . 4.04.01.01 . 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKD	% realisasi penyerapan anggaran SKPD	82%	1.738.268.180	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BKD	% realisasi penyerapan anggaran SKPD	82%	1.738.268.180	
4.04 . 4.04.01.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BKD	Pemeliharaan kebersihan gedung perkantoran terpadu	12 bulan	862.814.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BKD	Pemeliharaan kebersihan gedung perkantoran terpadu	12 bulan	700.916.400	Pengurangan pembelian alat kebersihan asumsi kebutuhan barang sudah terpenuhi pada tahun 2018
4.04 . 4.04.01.01 . 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKD	Jenis Penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung operasional perkantoran	30 jenis	135.321.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BKD	Jenis Penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung operasional perkantoran	30 jenis	135.321.000	
4.04 . 4.04.01.01 . 01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKD	Jenis penyediaan barang cetakan untuk mendukung operasional perkantoran	5 jenis	102.238.180	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKD	Jenis penyediaan barang cetakan untuk mendukung operasional perkantoran	5 jenis	102.238.180	
4.04 . 4.04.01.01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKD	penyediaan komponen instalasi listrik untuk perawatan gedung perkantoran	12 bulan	1.214.336.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKD	penyediaan komponen instalasi listrik untuk perawatan gedung perkantoran terpadu	12 bulan	230.083.700	Pengurangan pembelian alat listrik asumsi kebutuhan barang sudah terpenuhi pada tahun 2018
4.04 . 4.04.01.01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BKD	Jenis surat kabar harian di SKPD	3	16.290.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BKD	Jenis surat kabar harian di SKPD	3	16.290.000	
4.04 . 4.04.01.01 . 01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKD	penyediaan bahan logistik untuk pegawai	12 bulan	63.380.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKD	penyediaan bahan logistik untuk pegawai	12 bulan	63.380.000	
4.04 . 4.04.01.01 . 01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	BKD	undangan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri	330 org/hari	109.751.400	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	BKD	undangan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri	330 org/hari	109.751.400	
4.04 . 4.04.01.01 . 01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	BKD	undangan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	564 org/hari	11.550.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	BKD	undangan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	564 org/hari	11.550.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.04 . 4.04.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKD	Persentase aset dalam kondisi baik	80%	6.314.750.750	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKD	Persentase aset dalam kondisi baik	80%	5.879.860.360	
4.04 . 4.04.01.01 . 02.08	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	BKD		8 unit	96.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BKD		8 unit	96.000.000	
4.04 . 4.04.01.01 . 02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BKD	% Aset bangunan dalam kondisi baik	80%	1.568.387.150	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BKD	% Aset bangunan dalam kondisi baik	80%	1.389.225.500	Pengurangan pembelian belanja modal asumsi kebutuhan barang sudah terpenuhi pada tahun 2018
4.04 . 4.04.01.01 . 02.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BKD	% kendaraan dinas jabatan dan operasional dalam kondisi baik	95%	635.450.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BKD	% kendaraan dinas jabatan dan operasional dalam kondisi baik	95%	635.450.000	
4.04 . 4.04.01.01 . 02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKD	% peralatan kantor dalam kondisi baik	85%	105.936.600	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	BKD	% peralatan kantor dalam kondisi baik	85%	105.936.600	
4.04 . 4.04.01.01 . 02.31	Pelayanan Operasional Gedung Perkantoran Terpadu	BKD	Jumlah tenaga harian lepas gedung perkantoran terpadu yang dibayarkan	124 orang	3.908.977.000	Pelayanan Operasional Gedung Perkantoran Terpadu	BKD	Jumlah tenaga harian lepas gedung perkantoran terpadu yang dibayarkan	124 orang	3.653.248.260	Pengurangan pembelian belanja modal asumsi kebutuhan barang sudah terpenuhi pada tahun 2018
4.04 . 4.04.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKD	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	85%	81.620.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKD	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	85%	81.620.000	
4.04 . 4.04.01.01 . 05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	BKD	Jumlah ASN yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi	6	81.620.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	BKD	Jumlah ASN yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi	6	81.620.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx	Program Pertanggungjawaban APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKD	Persentase OPD yang menyusun laporan pendapatan dan belanja dengan benar dan sesuai	90%	803.051.600	Program Pertanggungjawaban APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKD	Persentase OPD yang menyusun laporan pendapatan dan belanja dengan benar dan sesuai	90%	803.051.600	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun SKPKD	BKD	Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan akhir tahun tepat waktu	36	288.034.700	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun SKPKD	BKD	Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan akhir tahun tepat waktu	36	288.034.700	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan	BKD	Jumlah OPD yang menyusun laporan pendapatan dan belanja tanpa koreksi sesuai BA hasil rekonsiliasi	35	114.200.000	Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan	BKD	Jumlah OPD yang menyusun laporan pendapatan dan belanja tanpa koreksi sesuai BA hasil rekonsiliasi	35	114.200.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perwali Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	BKD	Jumlah perwali pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2	209.777.700	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perwali Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	BKD	Jumlah perwali pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2	209.777.700	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	Jumlah Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	1	191.039.200	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	Jumlah Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	1	191.039.200	

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.04 . 4.04.01.01 . Xx	Program Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	BKD	Penetapan APBD	tepat waktu	1.967.732.000	Program Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	BKD	Penetapan APBD	tepat waktu	1.967.732.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD	BKD	Jumlah Perda dan Perwali APBD yang disusun tepat waktu	2 peraturan	833.200.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD	BKD	Jumlah Perda dan Perwali APBD yang disusun tepat waktu	2 peraturan	833.200.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang p-APBD dan Penjabaran p-APBD	BKD	Jumlah Perda dan Perwali P-APBD yang disusun tepat waktu	2 peraturan	833.200.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang p-APBD dan Penjabaran p-APBD	BKD	Jumlah Perda dan Perwali P-APBD yang disusun tepat waktu	2 peraturan	833.200.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Fasilitasi Pengembangan dan Integrasi Teknologi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	2 sistem	301.332.000	Fasilitasi Pengembangan dan Integrasi Teknologi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	2 sistem	301.332.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx	Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah	BKD	Persentase SKPD dengan realisasi belanja diatas 80%	80%	837.451.500	Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah	BKD	Ketepatan waktu penyampaian laporan penatausahaan keuangan	100%	707.451.500	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	BKD	Jumlah penerbitan SP2D	11000	242.451.500	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	BKD	% realisasi belanja yang sesuai dengan anggaran kas	80%	242.451.500	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas	BKD	Jumlah dokumen PPKD yang diarsipkan	12 dokumen	20.000.000	Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas	BKD	Jumlah dokumen PPKD yang diarsipkan	10000	20.000.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Penatausahaan keuangan PPKD	BKD	% dokumen Penatausahaan belanja tidak langsung pada PPKD yang tertib dan benar	90%	95.000.000	Penatausahaan keuangan PPKD	BKD	Tertib administrasi realisasi belanja hibah dan bansos	100%	95.000.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BKD	melakukan penatausahaan belanja dengan benar sesuai BA rekonsiliasi	38	130.000.000						
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	BKD	Tingkat pemahaman pengelola keuangan SKPD dala menyusun SPJ	90%	250.000.000	Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	BKD	tingkat pemahaman peserta terhadap peraturan pengelolaan keuangan dan	75%	250.000.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Peningkatan pelayanan gaji PNS	BKD	Terbayarnya gaji PNS tepat waku	100%	100.000.000	Peningkatan pelayanan gaji PNS	BKD	Validasi Data Gaji PNS	80%	100.000.000	

NO	Rancangan Awal RPKD				Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja			Target capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKD	Persentase SKPD yang menyusun neraca aset dengan benar dan tepat waktu	90%	2.522.003.970	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKD	Persentase SKPD yang menyusun neraca aset dengan benar dan tepat waktu	90%	2.522.003.970	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	BKD	Jumlah SKPD dengan KIB valid sesuai BA rekonsiliasi aset	36	1.000.000.000	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	BKD	Jumlah SKPD dengan KIB valid sesuai BA rekonsiliasi aset	36	1.000.000.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah	BKD	Jumlah sistem informasi pengelolaan aset	2	850.000.000	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah	BKD	Jumlah sistem informasi pengelolaan aset	2	850.000.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Manajemen Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	BKD	% kasus TP-TGR yang ditindaklanjuti	80%	84.524.000	Manajemen Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	BKD	% kasus TP-TGR yang ditindaklanjuti	80%	84.524.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Pemeliharaan Aset Milik Pemerintah Daerah	BKD	Jumlah bangunan/gedung yang dipelihara	1 bangunan	110.000.000	Pemeliharaan Aset Milik Pemerintah Daerah	BKD	Jumlah bangunan/gedung yang dipelihara	1 bangunan	110.000.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Penertiban dan Pengamanan Aset	BKD	Jumlah penyelesaian kasus sengketa aset	2	261.651.500	Penertiban dan Pengamanan Aset	BKD	Jumlah penyelesaian kasus sengketa aset	2	261.651.500	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKD	% SKPD yang menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah	80	137.948.470	Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKD	% SKPD yang menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah	80	137.948.470	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan	BKD		2 dokumen	77.880.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan	BKD		2 dokumen	77.880.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	BKD	Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	7%	1.316.972.600	Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	BKD	Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	7%	1.316.972.600	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	BKD	% WP yang membayar pajak tepat waktu	85	748.869.600	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	BKD	% WP yang membayar pajak tepat waktu	85	748.869.600	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Optimalisasi Administrasi Pajak Daerah	BKD	Jumlah Laporan Realisasi Pajak daerah Yang valid	1	390.283.000	Optimalisasi Administrasi Pajak Daerah	BKD	Jumlah Laporan Realisasi Pajak daerah Yang valid	1	390.283.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx Xx	Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	BKD	% WP yang membayar pajak sesuai omzet	90%	177.820.000	Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	BKD	% WP yang membayar pajak sesuai omzet	90%	177.820.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Program Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Pajak Daerah	BKD	% data wajib pajak daerah yang tervalidasi	30%	4.561.207.200	Program Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Pajak Daerah	BKD	% data wajib pajak daerah yang tervalidasi	30%	4.561.207.200	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Verifikasi Data Pajak Daerah	BKD	% obyek pajak yang terverifikasi	50	136.997.300	Verifikasi Data Pajak Daerah	BKD	% obyek pajak yang terverifikasi	50	136.997.300	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah	BKD	% WP yang paham aturan perpajakan sesuai hasil jawaban kuesioner yang benar diatas 80%	85	55.000.000	Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah	BKD	% WP yang paham aturan perpajakan sesuai hasil jawaban kuesioner yang benar diatas 80%	85	55.000.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah	BKD	Jumlah sistem informasi pajak yang dipelihara	1	285.000.000	Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah	BKD	Jumlah sistem informasi pajak yang dipelihara	1	285.000.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Cetak Masal SPPT PBB P2 dan Pendistribusian PBB P2	BKD	% SPPT PBB yang tercetak dan terdistribusi	85%	272.520.000	Cetak Masal SPPT PBB P2 dan Pendistribusian PBB P2	BKD	% SPPT PBB yang tercetak dan terdistribusi	85%	272.520.000	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	BKD	% NIOP yang tidak terbayar atau kembali ke loket pelayanan	25	236.689.900	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	BKD	% NIOP yang tidak terbayar atau kembali ke loket pelayanan	25	236.689.900	
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Pemetaan Potensi Pajak Daerah	BKD	Jumlah Database potensi pajak	8	3.575.000.000	Pemetaan Potensi Pajak Daerah	BKD	Jumlah Database potensi pajak	8	3.575.000.000	
	JUMLAH				25.922.596.780					23.649.356.490	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang sehingga pada tahun 2019 tidak menerima usulan kegiatan dari masyarakat.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

NO.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berpedoman pada RKP Tahun 2019 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan peraturan tersebut, diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang, BKD mengacu pada pelaksanaan Prioritas Nasional 5 Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang telah ditetapkan diantaranya adalah meningkatkan kepastian hukum dan reformasi birokrasi dengan agenda :

- a. Meningkatkan kualitas penegakan hukum
- b. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi
- c. Meningkatkan pelaksanaan e-government
- d. Mengoptimalkan Talent Management national
- e. Meningkatkan pengawasan program prioritas nasional.

Dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, BKD menetapkan tujuan

untuk pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel diharapkan pemerintah Kota Batu terus melangkah pada usaha-usaha dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan e-government, Badan Keuangan daerah senantiasa menyusun program dan kegiatan dalam usaha untuk melakukan integrasi pengelolaan sistem informasi untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan.

Program yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional pada tahun 2019 yaitu:

1. Program Pertanggungjawaban APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah
2. Program Penyusunan APBD dan Perubahan APBD
3. Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah
4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Pajak Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, perumusan kegiatan RKPD 2019 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan RKPBMMD sebagai bahan pertimbangan skala prioritas pembangunan
2. Upaya memperoleh opini WTP
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) basis akrual
4. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
5. Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
7. Dukungan kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah terkait investasi
8. Transparansi pengelolaan anggaran
9. Penerapan SIKD-TIK

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan upaya melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif untuk menjembatani visi dan misi kepala daerah menuju program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu. Tanpa adanya tujuan dan sasaran, visi dan misi kepala daerah dan Badan Keuangan Daerah Kota Batu akan sangat sulit dioperasionalkan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran ini merupakan dampak yang diharapkan terwujud sebagai bentuk keberhasilan pembangunan daerah. Yang dimaksud tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional agar dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

Penetapan Rumusan Tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Batu adalah sesuai dengan rumusan tujuan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu. Adapun tujuan yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah Kota Batu adalah: **“Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel.”**

Sasaran strategis yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah.
2. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan Daerah

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan dengan benar dan tepat waktu	80%	90%	95%	98%	98%
			Prosentase Peningkatan PAD	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
		Meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah	% realisasi penerimaan pajak daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Kerja Tahun 2019 adalah perencanaan tahun kedua dari rencana strategis Badan Keuangan Daerah. Pada tahun 2019 target kinerja untuk pencapaian tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu :

1. Opini BPK, dengan target mempertahankan opini WTP. Sasaran yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah prosentase OPD yang menyusun laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu sebesar 90%;
2. Prosentase peningkatan PAD, dengan target peningkatan sebesar 3,50%. Sasaran yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah persentase realisasi penerimaan pajak daerah sebesar 100%.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2018 – 2022 dan target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sesuai dokumen tersebut. Salah satu pertimbangan dalam penyusunan Program Kegiatan Badan Keuangan Daerah dalam Rencana Kerja Tahun 2019 adalah visi dan misi kepala daerah masa jabatan 2018-2022. Dimana untuk mewujudkan Visi

Badan Keuangan Daerah menyusun Program dan kegiatan tahun 2019 sebagaimana tabel T-C.23 berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah Kota Batu

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 . 4.04.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Survey Kepuasan terhadap layanan administrasi keuangan	BKD	78	5.809.457.260	APBD		79	8.269.491.340
4.04 . 4.04.01.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan surat masuk dan keluar yang ditindaklanjuti	BKD	11000	16.658.400	APBD		11.000	18.324.240
4.04 . 4.04.01.01 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran listrik, air, telepon, tv kabel	BKD	12 bulan	2.685.000.000	APBD		12 bulan	3.571.920.000
4.04 . 4.04.01.01 . 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% realisasi penyerapan anggaran SKPD	BKD	82%	1.738.268.180	APBD		1	1.912.000.000
4.04 . 4.04.01.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemeliharaan kebersihan gedung perkantoran terpadu	BKD	12 bulan	700.916.400	APBD		12 bulan	949.095.400
4.04 . 4.04.01.01 . 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis Penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung operasional perkantoran	BKD	30 jenis	135.321.000	APBD		30 jenis	148.853.100
4.04 . 4.04.01.01 . 01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis penyediaan barang cetakan untuk mendukung operasional perkantoran	BKD	5 jenis	102.238.180	APBD		5 jenis	112.461.000
4.04 . 4.04.01.01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik untuk perawatan gedung perkantoran terpadu	BKD	12 bulan	230.083.700	APBD		12 bulan	1.335.769.600
4.04 . 4.04.01.01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis surat kabar harian di SKPD	BKD	3	16.290.000	APBD		3	17.919.000
4.04 . 4.04.01.01 . 01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	penyediaan bahan logistik untuk pegawai	BKD	12 bulan	63.380.000	APBD		12 bulan	69.718.000
4.04 . 4.04.01.01 . 01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	undangan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri	BKD	330 org/hari	109.751.400	APBD		330 org/hari	120.726.000
4.04 . 4.04.01.01 . 01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	undangan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	BKD	564 org/hari	11.550.000	APBD		564 org/hari	12.705.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 . 4.04.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aset dalam kondisi baik	BKD	80%	5.879.860.360	APBD		1	6.927.624.700
4.04 . 4.04.01.01 . 02.08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		BKD	8 unit	96.000.000	APBD		8 unit	87.000.000
4.04 . 4.04.01.01 . 02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	% Aset bangunan dalam kondisi baik	BKD	80%	1.389.225.500	APBD		80%	1.725.225.000
4.04 . 4.04.01.01 . 02.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	% kendaraan dinas jabatan dan operasional dalam kondisi baik	BKD	95%	635.450.000	APBD		95%	698.995.000
4.04 . 4.04.01.01 . 02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	% peralatan kantor dalam kondisi baik	BKD	85%	105.936.600	APBD		85%	116.530.000
4.04 . 4.04.01.01 . 02.31	Pelayanan Operasional Gedung Perkantoran Terpadu	Jumlah tenaga harian lepas gedung perkantoran terpadu yang dibayarkan honrariumnya	BKD	124 orang	3.653.248.260	APBD		124	4.299.874.700
4.04 . 4.04.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	BKD	85%	81.620.000	APBD		85%	89.782.000
4.04 . 4.04.01.01 . 05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi	BKD	6	81.620.000	APBD		6	89.782.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx	Program Pertanggungjawaban APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun laporan pendapatan dan belanja dengan benar dan sesuai SAP	BKD	90%	803.051.600	APBD		90%	887.266.720
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun SKPKD	Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan akhir tahun tepat waktu	BKD	36	288.034.700	APBD		38	320.768.200
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Jumlah OPD yang menyusun laporan pendapatan dan belanja tanpa koreksi sesuai BA hasil rekonsiliasi	BKD	35	114.200.000	APBD		36	125.600.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perwali Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Jumlah perda dan perwali pertanggungjawab an pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	BKD	2	209.777.700	APBD		2	230.755.400
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	BKD	1	191.039.200	APBD		1	210.143.120

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 . 4.04.01.01 . Xx.	Program Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Penetapan APBD	BKD	tepat waktu	1.967.732.000	APBD		tepat waktu	1.985.465.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perwali APBD yang disusun tepat waktu	BKD	2 peraturan	833.200.000	APBD		2	845.000.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang p-APBD dan Penjabaran p-APBD	Jumlah Perda dan Perwali P-APBD yang disusun tepat waktu	BKD	2 peraturan	833.200.000	APBD		2	845.000.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Fasilitasi Pengembangan dan Integrasi Teknologi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	BKD	2 sistem	301.332.000	APBD		2	295.465.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx	Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan penatausahaan keuangan	BKD	100%	837.451.500	APBD		100%	974.876.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	% realisasi belanja yang sesuai dengan anggaran kas	BKD	80%	242.451.500	APBD		90%	353.866.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas	Jumlah dokumen PPKD yang diarsipkan	BKD	10000	20.000.000	APBD		10.000	21.010.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penatausahaan keuangan PPKD	Tertib administrasi realisasi belanja hibah dan bansos	BKD	100%	95.000.000	APBD		100%	100.000.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Pengendalian penatausahaan pelaksanaan anggaran	Jumlah SKPD yang melakukan penatausahaan belanja dengan benar sesuai BA rekonsiliasi penatausahaan keuangan	BKD	75%	130.000.000	APBD		80%	140.000.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	Tingkat pemahaman peserta terhadap peraturan pengelolaan keuangan dan penatausahaan	BKD	75%	250.000.000	APBD		80%	250.000.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Peningkatan pelayanan gaji PNS	Validasi Data Gaji PNS	BKD	80%	100.000.000	APBD		80%	110.000.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang menyusun neraca aset dengan benar dan tepat waktu	BKD	90%	2.522.003.970	APBD		95%	2.859.907.435
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah SKPD dengan KIB valid sesuai BA rekonsiliasi aset	BKD	36	1.000.000.000	APBD		37	1.540.990.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah	Jumlah sistem informasi pengelolaan aset	BKD	2	850.000.000	APBD		2	520.564.385
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Manajemen Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	% kasus TP-TGR yang ditindaklanjuti	BKD	80%	84.524.000	APBD		90%	92.976.400
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Pemeliharaan Aset Milik Pemerintah Daerah	Jumlah bangunan/ gedung yang dipelihara	BKD	bangunan	110.000.000	APBD		1	110.000.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penertiban dan Pengamanan Aset	Jumlah penyelesaian kasus sengketa aset	BKD	2	261.651.500	APBD		1	287.816.650
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah	% SKPD yang menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah	BKD	80	137.948.470	APBD		100	307.560.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan		BKD	2 dokumen	77.880.000	APBD		-	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	% realisasi penerimaan pajak daerah	BKD	100%	1.316.972.600	APBD		100%	851.935.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Optimalisasi pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	% penurunan piutang pajak daerah	BKD	5%	748.869.600	APBD		5%	468.567.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Optimalisasi Administrasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pajak daerah Yang valid	BKD	1	390.283.000	APBD		1	279.800.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	% WP yang membayar pajak tepat waktu	BKD	94%	177.820.000	APBD		96%	103.568.000
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Program Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Pajak Daerah	% data wajib pajak daerah yang tervalidasi	BKD	35%	4.561.207.200	APBD		55%	1.225.074.059
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Verifikasi Data Pajak Daerah	% obyek pajak yang terverifikasi	BKD	40%	136.997.300	APBD		60%	150.697.030
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah	% WP yang melaporkan pajaknya sesuai aturan perpajakan yang berlaku	BKD	85%	55.000.000	APBD		85%	62.446.890
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah	Jumlah sistem informasi pajak yang dipelihara	BKD	1	285.000.000	APBD		85	344.234.110
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Cetak Masal SPPT PBB P2 dan Pendistribusian PBB P2	% SPPT PBB yang tercetak dan terdistribusi	BKD	85%	272.520.000	APBD		98%	322.519.450
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	% NIOP yang tidak terbayar atau kembali ke loket pelayanan	BKD	25%	236.689.900	APBD		25%	176.284.779
4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Pemetaan Potensi Pajak Daerah	Jumlah Database potensi pajak	BKD	8	3.575.000.000	APBD		8	168.891.800
	JUMLAH				23.779.356.490				24.071.422.254

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah 2018 - 2022. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrument pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2019 dan prakiraan maju Tahun 2020. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Keuangan Daerah.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 ini merupakan aplikasi teknis penjabaran Program kegiatan dengan target capaian yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2019 merencanakan pelaksanaan Program Kegiatan yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul. Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu meliputi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang. Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam rangka menyempurnakan penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 ini diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

Batu, Juli 2018

KEPALA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Drs. ZADIM EFFISIENSI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670404 198602 1 003

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Batu**

A. NAMA OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode Urusan / urusan : **4. Urusan Penunjang Keuangan**

B. INFORMASI RINGKAS

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Indikatif (dalam rupiah)			
		Jumlah	APBD II	APBD I	APBN
9	45	26.122.596.780,00	26.122.596.780,00	0,00	0,00

C. ISU STRATEGIS

- Adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung gerakan transaksi non tunai dalam melakukan transaksi keuangan menuntut adanya perubahan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan keterpaduan perencanaan dan penganggaran perlu adanya pemantapan sistem informasi terintegrasi guna mewujudkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah

D. FOKUS

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus kegiatan pada: pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual; pengembangan pelayanan pendapatan; pengendalian pajak daerah melalui intensifikasi/ekstensifikasi/sertifikasi; promosi dan sosialisasi pelayanan wajib pajak; serta penyusunan potensi pendapatan

E. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PD

- Opini BPK
- Persentase Peningkatan PAD

F. MATRIK RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019(TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	APBD II (DAU / PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK / DAK NON FISIK / DHCT / PAJAK NEGARA)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4.04 . 4.04.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Survey Kepuasan terhadap layanan administrasi keuangan	BKD	78	7.517.807.160,00	1.738.268.180,00	4.879.202.980,00	900.336.000,00	7.517.807.160,00	-	-		79	8.269.491.340,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan surat masuk dan keluar yang ditindaklanjuti	BKD	11000	16.658.400,00		16.658.400,00		16.658.400,00				11.000	18.324.240,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran listrik, air, telepon, tv kabel	BKD	12 bulan	3.247.200.000,00		3.247.200.000,00		3.247.200.000,00				12 bulan	3.571.920.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% realisasi penyerapan anggaran SKPD	BKD	82%	1.738.268.180,00	1.738.268.180,00			1.738.268.180,00				1	1.912.000.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemeliharaan kebersihan gedung perkantoran terpadu	BKD	12 bulan	862.814.000,00		862.814.000,00		862.814.000,00				12 bulan	949.095.400,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis Penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung operasional perkantoran	BKD	30 jenis	135.321.000,00		135.321.000,00		135.321.000,00				30 jenis	148.853.100,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis penyediaan barang cetakan untuk mendukung operasional perkantoran	BKD	5 jenis	102.238.180,00		102.238.180,00		102.238.180,00				5 jenis	112.461.000,00

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019(TAHUN RENCANA)								CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
										APBD II (DAU / PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)				APBN (DAK FISIK / DAK NON FISIK / DHCT / PAJAK BUNGA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4.04 . 4.04.01.01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik untuk perawatan gedung perkantoran terpadu	BKD	12 bulan	1.214.336.000,00		314.000.000,00	900.336.000,00	1.214.336.000,00				12 bulan	1.335.769.600,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis surat kabar harian di SKPD	BKD	3	16.290.000,00		16.290.000,00		16.290.000,00				3	17.919.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	penyediaan bahan logistik untuk pegawai	BKD	12 bulan	63.380.000,00		63.380.000,00		63.380.000,00				12 bulan	69.718.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	undangan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri	BKD	330 org/hari	109.751.400,00		109.751.400,00		109.751.400,00				330 org/hari	120.726.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	undangan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	BKD	564 org/hari	11.550.000,00		11.550.000,00		11.550.000,00				564 org/hari	12.705.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aset dalam kondisi baik	BKD	80%	6.314.750.750,00	450.000.000,00	5.057.363.750,00	807.387.000,00	6.314.750.750,00				1	6.927.624.700,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 02.08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		BKD	8 unit	96.000.000,00			96.000.000,00	96.000.000,00				8 unit	87.000.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	% Aset bangunan dalam kondisi baik	BKD	80%	1.568.387.150,00		1.200.000.150,00	368.387.000,00	1.568.387.150,00				1	1.725.225.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 02.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	% kendaraan dinas jabatan dan operasional dalam kondisi baik	BKD	95%	635.450.000,00		500.450.000,00	135.000.000,00	635.450.000,00				1	698.995.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	% peralatan kantor dalam kondisi baik	BKD	85%	105.936.600,00		105.936.600,00		105.936.600,00				1	116.530.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 02.31	Pelayanan Operasional Gedung Perkantoran Terpadu	Jumlah tenaga harian lepas gedung perkantoran terpadu yang dibayarkan honorariumnya	BKD	124 orang	3.908.977.000,00	450.000.000,00	3.250.977.000,00	208.000.000,00	3.908.977.000,00				124	4.299.874.700,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	BKD	85%	81.620.000,00	-	81.620.000,00	-	81.620.000,00				1	89.782.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . 05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi	BKD	6	81.620.000,00		81.620.000,00		81.620.000,00				6	89.782.000,00

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019(TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SUMBER DANA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
										APBD II (DAU / PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK / DAK NON FISIK / DHCT / PAJAK BUKU)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx	Program Pertanggungjawaban APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun laporan pendapatan dan belanja dengan benar dan sesuai SAP		90%	803.051.600,00	73.000.000,00	730.051.600,00		-	803.051.600,00			1	887.266.720,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun SKPKD	Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan akhir tahun tepat waktu		36	288.034.700,00	15.000.000,00	273.034.700,00		-	288.034.700,00			38	320.768.200,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Jumlah OPD yang menyusun laporan pendapatan dan belanja tanpa koreksi sesuai BA hasil rekonsiliasi		35	114.200.000,00		114.200.000,00			114.200.000,00			36	125.600.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perwali Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Jumlah perda dan perwali pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu		2	209.777.700,00	58.000.000,00	151.777.700,00			209.777.700,00			2	230.755.400,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun		1	191.039.200,00		191.039.200,00			191.039.200,00			1	210.143.120,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx.	Program Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Penetapan APBD		tepat waktu	2.167.732.000,00	1.100.000.000,00	1.067.732.000,00		-	2.167.732.000,00			tepat waktu	1.955.465.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perwali APBD yang disusun tepat waktu		2 peraturan	833.200.000,00	550.000.000,00	283.200.000,00			833.200.000,00			2	845.000.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang p-APBD dan Penjabaran p-APBD	Jumlah Perda dan Perwali P-APBD yang disusun tepat waktu		2 peraturan	833.200.000,00	550.000.000,00	283.200.000,00			833.200.000,00			2	845.000.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Fasilitasi Pengembangan dan Integrasi Teknologi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi		2 sistem	501.332.000,00		501.332.000,00			501.332.000,00		Pelatihan operator SIMDA di BPKP 80 orang selama 2 hari. Honor pemeliharaan jaringan 2 orang.	2	265.465.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx	Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase SKPD dengan realisasi belanja diatas 80%		80%	837.451.500,00	-	837.451.500,00		-	837.451.500,00			1	669.016.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan	Jumlah penerbitan SP2D		11000	242.451.500,00		242.451.500,00			242.451.500,00			37	353.866.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas	Jumlah dokumen PPKD yang diarsipkan		12 dokumen	20.000.000,00		20.000.000,00			20.000.000,00				22.000.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx. Xx	Penatausahaan keuangan PPKD	% dokumen Penatausahaan belanja tidak langsung pada PPKD yang tertib dan benar		90%	95.000.000,00		95.000.000,00			95.000.000,00				

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019(TAHUN RENCANA)									CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SUMBER DANA				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
										APBD II (DAU / PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)	APBN (DAK FISIK / DAK NON FISIK / DHCT / PAJAK DAERAH)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang melakukan penatausahaan belanja dengan benar sesuai BA rekonsiliasi penatausahaan keuangan		38	130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00					183.150.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	Tingkat pemahaman pengelola keuangan SKPD dala menyusun SPJ		90%	250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00					
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Peningkatan pelayanan gaji PNS	Terbayarnya gaji PNS tepat waku		100%	100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00					110.000.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang menyusun neraca aset dengan benar dan tepat waktu		90%	2.522.003.970,00	779.725.000,00	1.086.778.970,00	655.500.000,00	2.522.003.970,00				1	2.749.907.435,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah SKPD dengan KIB valid sesuai BA rekonsiliasi aset		36	1.000.000.000,00	450.000.000,00	300.000.000,00	250.000.000,00	1.000.000.000,00				37	1.540.990.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah	Jumlah sistem informasi pengelolaan aset		2	850.000.000,00	-	450.000.000,00	400.000.000,00	850.000.000,00				2	520.564.385,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Manajemen Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	% kasus TP-TGR yang ditindaklanjuti		80%	84.524.000,00	80.575.000,00	3.949.000,00	-	84.524.000,00				1	92.976.400,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Pemeliharaan Aset Milik Pemerintah Daerah	Jumlah bangunan/ gedung yang dipelihara		1 bangunan	110.000.000,00	-	110.000.000,00	-	110.000.000,00					
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Penertiban dan Pengamanan Aset	Jumlah penyelesaian kasus sengketa aset		2	261.651.500,00	235.950.000,00	20.201.500,00	5.500.000,00	261.651.500,00				1	287.816.650,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah	% SKPD yang menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah		80	137.948.470,00	13.200.000,00	124.748.470,00	-	137.948.470,00				100	307.560.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan			2 dokumen	77.880.000,00	-	77.880.000,00	-	77.880.000,00					
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah		7%	1.316.972.600,00	376.650.000,00	570.643.600,00	369.679.000,00	1.316.972.600,00				0	851.935.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	% WP yang membayar pajak tepat waktu		85	748.869.600,00	282.650.000,00	385.333.600,00	80.886.000,00	748.869.600,00				85	468.567.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Optimalisasi Administrasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pajak daerah Yang valid		1	390.283.000,00	49.000.000,00	52.490.000,00	288.793.000,00	390.283.000,00				1	279.800.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	% WP yang membayar pajak sesuai omzet		90%	177.820.000,00	45.000.000,00	132.820.000,00	-	177.820.000,00				1	103.568.000,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Program Pengembangan dan Pengelolaan Potensi Pajak Daerah	% data wajib pajak daerah yang tervalidasi		30%	4.561.207.200,00	193.900.000,00	2.105.807.200,00	2.261.500.000,00	4.561.207.200,00				1	3.956.182.259,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Verifikasi Data Pajak Daerah	% obyek pajak yang terverifikasi		50	136.997.300,00	37.200.000,00	99.797.300,00		136.997.300,00				1	150.697.030,00

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2019(TAHUN RENCANA)								CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
										APBD II (DAU / PAD)	APBD I (BANTUAN KEUANGAN)				APBN (DAK FISIK / DAK NON FISIK / DHCT / PAJAK POTENSI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah	% WP yang paham aturan perpajakan sesuai hasil jawaban kuesioner yang benar		85	55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00				85	62.446.890,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah	Jumlah sistem informasi pajak yang dipelihara		1	285.000.000,00	58.500.000,00	65.000.000,00	161.500.000,00	285.000.000,00				1	344.234.110,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Cetak Masal SPPT PBB P2 dan Pendistribusian PBB P2	% SPPT PBB yang tercetak dan terdistribusi		85%	272.520.000,00	5.700.000,00	266.820.000,00		272.520.000,00				1	322.519.450,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	% NIOP yang tidak terbayar atau kembali ke loket pelayanan		25	236.689.900,00	17.400.000,00	219.289.900,00		236.689.900,00				25	176.284.779,00
	4.04 . 4.04.01.01 . Xx . Xx	Pemetaan Potensi Pajak Daerah	Jumlah Database potensi pajak		8	3.575.000.000,00	75.100.000,00	1.399.900.000,00	2.100.000.000,00	3.575.000.000,00				8	2.900.000.000,00
					Jumlah	26.122.596.780,00	4.711.543.180,00	16.416.651.600,00	4.994.402.000,00	26.122.596.780,00	-	-			26.356.670.454,00

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Drs. ZADIM EFFISIENSI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670404 198602 1 003